

KETIMPANGAN WILAYAH URBAN DI PROVINSI JAWA BARAT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Yola Gili Saputri¹, Muhammad Arif²

¹Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Dosen Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : B300190275@student.ums.ac.id, Arifmdev@gmail.com

URL: <https://jpekbm.upjb.ac.id/index.php/files/article/view/20>

DOI : <https://doi.org/10.32682/v09z7678>

Abstract

One of the components of poverty that needs to be considered is the calculation of poverty based on the proportion of regional income distribution because it is basically a measure of relative poverty. One aspect of poverty that needs to be considered is income inequality. Income disparity reflects the distribution of development outcomes of a region or country, both received by individuals and through ownership of factors of production. The purpose of this study is to determine the direction and magnitude of the impact of inflation, labour force, regional independence, and the proportion of industrial labour on income inequality in urban areas of West Java Province between 2015 and 2021. This research design is descriptive and quantitative. The research instrument used panel data regression analysis. The research findings reveal that the most accurate estimation result is the Fixed Effect Model (FEM) estimation model. Income inequality is influenced by the labour force. Meanwhile, income inequality, inflation, and industrial labour ratio to regional independence in West Java Province cities from 2015 to 2021.

Keywords: Gini Ratio; Regional self reliance; labor force; Inflation; Proportion of Labor Industry.

Abstrak

Salah satu komponen kemiskinan yang perlu dipertimbangkan ialah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan regional karena pada dasarnya ini merupakan ukuran kemiskinan relatif. Salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan adalah ketimpangan pendapatan. Disparitas pendapatan mencerminkan distribusi hasil pembangunan suatu wilayah atau negara, baik yang diterima oleh individu maupun melalui kepemilikan faktor-faktor produksi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui arah dan besaran dampak inflasi, angkatan kerja, kemandirian daerah, dan proporsi tenaga kerja industri terhadap ketimpangan pendapatan di perkotaan Provinsi Jawa Barat antara tahun 2015 dan 2021. Desain penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan Analisis regresi data panel. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hasil estimasi yang paling akurat adalah model estimasi Fixed Effect Model (FEM). Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh angkatan kerja. Sementara itu, ketimpangan pendapatan, inflasi, dan rasio tenaga kerja industri terhadap kemandirian daerah di kota-kota Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Kata Kunci: Gini Ratio; Inflasi; Angkatan Kerja; Kemandirian Daerah; Proporsi Tenaga Kerja Industri.

Pendahuluan

Strategi pembangunan fundamental yaitu mengutamakan pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan selalu menjadi bahan perdebatan dalam pembangunan ekonomi.

Meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat masih dianggap sebagai strategi unggulan pembangunan ekonomi, namun tingginya perekonomian suatu daerah tidak menjamin pendapatan akan terdistribusi secara merata. Selama tahap pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mungkin saja terjadi, tetapi disertai dengan berbagai kesulitan seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan ketidaksetaraan struktural (Widyastuti & Indrawati, 2021).

Disparitas kesejahteraan ekonomi antara si kaya dan si miskin yang tercermin dari disparitas pendapatan dapat diartikan sebagai kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan.

Terdapat perbedaan faktor produksi dan sumber daya, maka ketimpangan antar wilayah disebut sebagai taraf hidup relatif penduduk. Karena perbedaan tersebut, Tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap daerah berbeda-beda, yang mengakibatkan kesenjangan kesejahteraan (Mahadi et al., 2022).

Rasio Gini (GR) ialah taraf ketimpangan yang sering digunakan dalam menilai perbedaan pendapatan. Menurut Kemenkeu (2018), semakin tinggi rasio Gini, semakin besar tingkat ketimpangan.

Ada 26 kota dan daerah di Provinsi Jawa Barat, masing-masing dengan karakteristik ekonomi, demografi, dan sumber daya alam yang berbeda. Tidak semua daerah di Jawa Barat memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi. Selain itu, jumlah penduduk wilayah Jawa Barat tidak merata; masih ada beberapa daerah yang memiliki populasi lebih besar dari yang lain. Hanya beberapa kota dan daerah di Jawa Barat yang memiliki angka Produk Domestik Bruto (PDRB) tinggi, sedangkan kota dan daerah lain hanya mampu menghasilkan pendapatan yang kecil atau bahkan tidak mencapai 50% dari pendapatan daerah lain seperti Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Menurut Aprianoor & Muktiali (2015), pembangunan di setiap daerah berbeda karena perbedaan pendapatan.

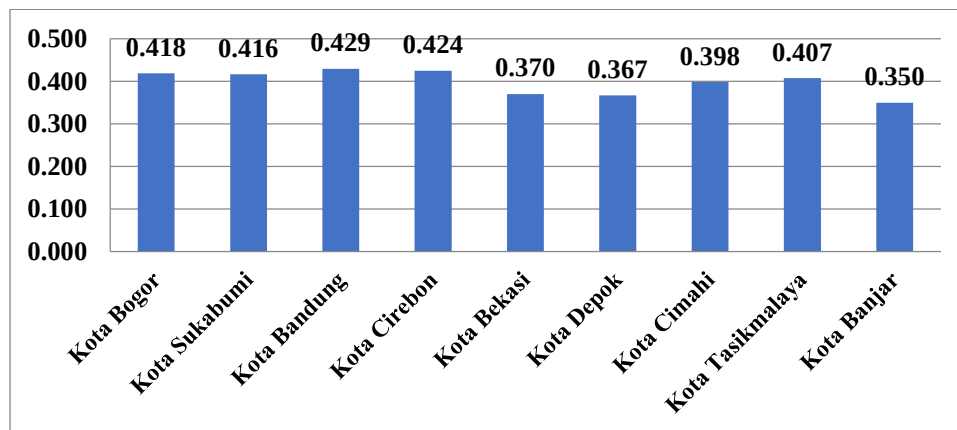
Gini Ratio Jawa Barat tercatat sebesar 0,405 pada September 2018, turun dari 0,407 pada Maret. Menurut Kemenkeu (2018), rasio gini Jawa Barat berfluktuasi dan cenderung menurun antara Maret 2015 hingga September 2018.

Berdasarkan Grafik 1.1, Gini Ratio Kota Cirebon lebih tinggi 0,429% dibandingkan delapan kota lainnya selama enam tahun. Dengan Gini Ratio rata-rata sebesar 0,424%, Kota Bekasi menempati urutan kedua. Dengan nilai sebesar 0,418 persen, Kota Bogor merupakan kota dengan rata-rata Gini Ratio tertinggi ketiga dari delapan. Kota Sukabumi menempati posisi kedua dengan Gini Ratio rata-rata 0,416%. Dengan Gini Ratio sebesar 0,350 persen, Kota Banjar memiliki rata-rata terendah.

Ketidaksetaraan tidak dapat dihilangkan; ia hanya dapat dikurangi hingga ke tingkat yang dapat diterima oleh semua komunitas atau sistem sosial tertentu untuk mempertahankan keselarasan sistemik selama evolusinya. Akibatnya, tidak mengherankan jika kesenjangan ini terus berlanjut baik di negara industri, negara berkembang, maupun negara berkembang.

Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah tingkat ketidakadilan. Ekspansi ekonomi, misalnya, memiliki pengaruh besar terhadap perubahan ketimpangan pendapatan.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Rata-Rata Gini Ratio di Daerah Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2021



Sumber: BPS, diolah

Inflasi, yang didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan uang yang tidak disertai dengan peningkatan output produk secara keseluruhan, ialah salah satu variabel yang berkontribusi pada kesenjangan pendapatan. Kemiskinan akan meningkat, pengangguran akan meningkat, kesejahteraan akan menurun, dan ketimpangan pendapatan akan meningkat sebagai akibat dari inflasi yang berlebihan yang tidak diimbangi dengan pemerataan ekonomi (Wahyuni & Andriyani, 2022).

Rasio Kemandirian Daerah membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah untuk mengetahui kemandirian suatu daerah dari bantuan pihak luar, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya (Kementerian Keuangan, 2018). PAD yang dapat dibiayai dari pajak, retribusi daerah, dan sumber lainnya, dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan memanfaatkannya untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik berupa pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana lain yang diperlukan, keberadaan PAD diantisipasi dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pembangunan infrastruktur mendapat perhatian lebih (Khusaini, 2018).

Sementara itu, ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan. Menurut penelitian sebelumnya (Santoso & Mukhlis, 2021), tenaga kerja dapat berdampak pada ketimpangan pendapatan karena tingkat pekerjaan seseorang dapat membuatnya menghasilkan lebih dari yang lain. Penelitian Laut et al. mengatakan bahwa (2020), karena peningkatan angkatan kerja dapat memperparah masalah

kesenjangan pendapatan, peningkatan angkatan kerja dapat memperburuk masalah kesenjangan pendapatan dikarenakan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan tersedianya lapangan kerja berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang ketimpangan pendapatan di perkotaan Provinsi Jawa Barat antara tahun 2015 dan 2021 serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya.

Kesenjangan kesejahteraan ekonomi yang ada antara si kaya dan si miskin disebut sebagai kesenjangan dalam distribusi pendapatan, atau ketimpangan. Di negara berkembang, hal ini terjadi akibat return impact yang kuat dan spread effect yang lemah. Dalam kegiatan perekonomian suatu daerah sering terjadi ketimpangan pendapatan antar daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa demografi dan kandungan sumber daya alam di setiap daerah berbeda. Karena perbedaan ini, kemampuan suatu wilayah untuk memimpin proses pembangunan pun berbeda-beda. Akibatnya, label "daerah maju" dan "daerah terbelakang" biasanya mengacu pada wilayah geografis yang berbeda (Sjafrizal, 2012).

Indeks Gini, seperti yang didefinisikan oleh BPS (2020), adalah ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi luas segitiga di bawah diagonalnya dengan luas diagonalnya sendiri. Rasio Gini dapat berkisar dari 0 hingga 1. Nilai 1 menunjukkan Ketimpangan Lengkap atau Ketimpangan Sempurna, di mana semua penduduk suatu negara tinggal di satu lokasi dan tidak ada di lokasi lain. Sejumlah nol menunjukkan bahwa populasi suatu negara tersebar sempurna di seluruh. Oleh karena itu, ketimpangan antara sebaran penduduk dengan jumlah lokasi semakin besar semakin tinggi nilai rasio konsentrasi gini (Anshari et al., 2018).

Kenaikan total biaya barang dan jasa dikenal sebagai inflasi. Rozali (2020) menegaskan bahwa inflasi akan mengakibatkan penurunan produksi dan penurunan permintaan. Akibatnya, permintaan tenaga kerja akan berkurang, yang akan menyebabkan ketimpangan dan pengangguran. Menurut Miskin (2010), inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga yang stabil yang berdampak pada individu, bisnis, dan pemerintah.

Koefisien Gini akan menurun akibat penduduk perkotaan lebih banyak berbelanja dan penduduk pedesaan berproduksi lebih banyak akibat inflasi. Inflasi dianggap sebagai alasan logis mengapa ketimpangan distribusi pendapatan menurun (Rahman & Putri, 2021). Penurunan ketimpangan diperkirakan karena penduduk pedesaan memasok barang-barang yang dibutuhkan kota, sehingga kenaikan inflasi akan mengakibatkan peningkatan pendapatan. Pendapatan penduduk perkotaan akan turun sementara penduduk pedesaan akan naik pemasukannya.

Angkatan kerja menurut Sukirno (2011) adalah jumlah orang yang bekerja dalam perekonomian selama periode waktu tertentu. Penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur merupakan angkatan kerja. Individu yang sedang menempuh pendidikan lanjutan, merawat keluarga, dan mencari nafkah tidak dihitung sebagai bagian dari angkatan kerja.

Peningkatan angkatan kerja dapat memperparah masalah kesenjangan pendapatan karena peningkatan angkatan kerja dapat memperparah masalah kesenjangan pendapatan (Laut et al.,) karena pengangguran meningkat sebagai akibat dari peningkatan jumlah pekerja yang tidak seimbang dengan tersedianya lapangan kerja. (2020).

Individu yang sehat secara fisik dan psikologis, serta memiliki bakat yang sangat baik, umumnya dibutuhkan untuk posisi yang ditawarkan oleh sebuah lembaga atau institusi. Tenaga kerja berketerampilan tinggi akan menghasilkan banyak uang. Di sisi lain, pekerja berketerampilan rendah akan mendapatkan penghasilan lebih sedikit. Pekerja dengan keterampilan rendah menghadapi situasi yang lebih sulit daripada pekerja dengan keterampilan tinggi karena pertumbuhan pendapatan mereka lebih lambat (stagnan) dibandingkan pekerja dengan keterampilan tinggi (ILO, 2013).

Dapat ditarik kesimpulan tidak langsung bahwa pekerja dengan keterampilan tinggi mengalami sebagian besar pertumbuhan pendapatan. Sementara itu, kondisi ini menyebabkan pekerja berketerampilan rendah menuntut upah yang rendah, yang dapat meningkatkan pengangguran. Akibatnya, ketimpangan meningkat dan pendapatan masyarakat menurun (Holifah, 2017).

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah memberikan kewenangan yang lebih kepada setiap daerah agar dapat berkembang secara maksimal. Salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menggenjot potensi pendapatan daerah (Enceng et al., 2012).

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan melalui kemampuan setiap pemerinth daerah dalam pembiayaan kegiatannya. Menurut Aulia (2014), Rasio kemandirian mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Rasio PAD pada total pendapatan daerah dapat memperlihatkan kemandirian finansial. Keuangan daerah merupakan faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan atau kemiskinan daerah. Diharapkan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan memiliki kemandirian finansial yang tinggi. Selain itu, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kemiskinan akan berkurang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Asmara & Suci, 2014).

Ketimpangan pendapatan meningkat di awal fase pembangunan sebagai akibat dari industrialisasi dan kemudian menurun ketika sektor industri perkotaan menyerap tenaga kerja atau produksi di pedesaan dan memperoleh lebih sedikit pendapatan dari pertanian.

Kesenjangan pendapatan dapat memburuk dari industri. Hal ini karena tenaga kerja terampil dan tidak terampil memiliki kesempatan dan akses sumber daya yang berbeda. Sektor pertanian ialah sektor yang berpengaruh dan prospektif bagi perekonomian untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia karena sektor pertanian merupakan sumber pendapatan

yang diperlukan untuk pembangunan, sumber lapangan kerja, dan sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduk negara berkembang yang berprofesi sebagai petani (Distovianti, 2019).

W. Arthur Lewis menegaskan bahwa keberadaan industri akan menyerap kelebihan tenaga kerja terampil masyarakat pertanian guna meningkatkan taraf hidup mereka. Akan tetapi, akan terjadi kemajuan pesat di kawasan industri sebagai akibat dari peningkatan tenaga kerja yang akan meningkatkan produktivitas kawasan (Sjafrizal, 2012).

Salah satu faktor yang membentuk persoalan disparitas pendapatan adalah keadaan penduduk. Wajar jika daerah dengan demografi yang menguntungkan berhasil melakukan kegiatan produksi, investor akan lebih tertarik, sehingga mereka dapat mendukung ekspansi di daerah dengan demografi yang menguntungkan. Investor akan tertarik untuk berinvestasi di kawasan industri karena kemampuan industri menyerap tenaga kerja terampil dari pertanian, sehingga produktivitas dan pendapatan di kawasan industri meningkat—dan tentu saja kemajuan yang lebih cepat daripada pertanian. karena pertanian menyerap tenaga kerja terampil, hanya menyisakan pekerja kurang terampil. Tentu saja hal ini akan menjadi akar permasalahan disparitas pendapatan (Fadilah et al., 2017).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis regresi data panel selama periode 2015-2021 di Daerah Kota Provinsi Jawa Barat.

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 \log(AK)_{it} + \beta_3 RKD_{it} + \beta_4 RTKI_{it} + \varepsilon_t$$

di mana:

IG	= Indeks Gini (%)
INF	= Inflasi (%)
AK	= Angkatan Kerja (Jiwa)
RKD	= Rasio Kemandirian Daerah (%)
RTKI	= Rasio Tenaga Kerja sektor Industri (%)
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
t	= Periode Waktu
i	= Kabupaten/Kota
ε_t	= <i>Error Term</i>
Log	= logaritma natural

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 menampilkan estimasi Regresi Data Panel dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM), Random Effect Model (REM), dan Pooled Ordinary Least Squares (PLS).

Uji Pemilihan Model Terestimasi

Uji Chow dan uji Hausman akan dipakai untuk memilih model terestimasi terbaik – *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model (REM)*.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrika Regresi Data Panel - Cross section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	0,516107	3,612332	0,566841
INF	-0,006191	-0,006826	-0,005483
RKD	0,125496	0,180534	0,028143
RTKI	-0,022557	-0,057793	-0,178010
LOG(AK)	-0,010485	-0,251822	-0,009907
R^2	0,056787	0,616234	0,083329
Adjusted. R^2	-0,008263	0,524131	0,020110
Statistik F	0,872978	6,690656	1,318106
Prob. Statistik F	0,485750	0,000001	0,274018
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross- Section $F(8,50) = 9,111160$; Prob. $F(8,50) = 0,0000$			
(2) Hausman			
Cross-Section random $\chi^2(4) = 12,283302$; Prob. $\chi^2 = 0,0154$			

Sumber: BPS, diolah

Uji Chow dipakai untuk menentukan model terestimasi *PLS* atau *FEM*. Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi *FEM* atau *REM*. Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ^2 sebesar 0,0154 ($< 0,05$), jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Dari uji Chow dan uji Hausman di muka, model *Fixed Effect Model (FEM)* terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model *FEM* tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Model Estimasi Fixed Effect Model

$\widehat{IG}_{it} = 3,612332$	$-0,006826$	INF_{it}	$+ 0,180534$	RKD_{it}	
		(0,1191)			(0,2495)
	$-0,057793$	$RTKI_{it}$	$- 0,251822$	$log(AK)_{it}$	
		(0,5724)		(0,0030)	
$R^2 = 0,616234$; $DW = 1,647480$; $F = 6,690656$; Prob. $F = 0,000001$					

Uji Eksistensi Model Terestimasi *FEM*

Dari Tabel 2, didapat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F bernilai 0,0001 ($< 0,01$); jadi H_0 ditolak. Kesimpulannya, model terestimasi *FEM* eksis.

Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2)

Daya prediksi model estimasi ditunjukkan oleh R^2 . Berdasarkan Tabel 2, *FEM* mempunyai nilai R^2 0,616234 yang menunjukkan bahwa Inflasi, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Tenaga Kerja Industri, dan Angkatan Kerja menyumbang 61,6 persen dari variasi dalam variabel Ketimpangan Pendapatan. Sisanya 38,4 persen dipengaruhi oleh variabel atau faktor non model lainnya.

Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi *FEM*

Analisa ini untuk menguji signifikansi dampak dari variabel independen secara individual atau parsial.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pengaruh

Variabel	Sig.t	Kriteria	Kesimpulan
<i>INF</i>	0,1191	$> 0,10$	Tidak Signifikan
<i>RKD</i>	0,2495	$> 0,10$	Tidak Signifikan
<i>RTKI</i>	0,5724	$> 0,10$	Tidak Signifikan
<i>LOG(AK)</i>	0,0030	$< 0,05$	Signifikan pada α 0,05

Sumber: Lampiran, diolah.

Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 3, Ketimpangan Pendapatan (IG) hanya dipengaruhi oleh angkatan kerja (AK). Sebaliknya, Ketimpangan Pendapatan (IG) tidak dipengaruhi oleh Rasio Tenaga Kerja Industri (RTKI), Rasio Kemandirian Daerah (RKD), atau Inflasi (INF).

Koefisien regresi untuk variabel angkatan kerja adalah dan memiliki pola hubungan linier-logaritmik. Artinya, ketimpangan pendapatan akan berkurang sebesar 0,0251822 persen jika angkatan kerja tumbuh sebesar 1 persen. Ketimpangan pendapatan kemungkinan besar akan naik sebesar 0,0251822% jika angkatan kerja menyusut satu persen.

Interpretasi Ekonomi

Ketimpangan Pendapatan di beberapa Kota di Provinsi Jawa Barat dalam waktu 2015-2021 ternyata hanya dipengaruhi oleh Angkatan Kerja (AK). Sementara, Rasio Kemandirian Daerah (RKD), Rasio Tenaga Kerja Industri (RTKI), dan Inflasi (INF) tidak memiliki dampak pada Ketimpangan Pendapatan (IG).

Inflasi

Berdasarkan temuan studi tersebut, ketimpangan pendapatan di Kota-kota Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2021 tidak akan terpengaruh oleh inflasi. Karena tenaga kerja tidak terserap di daerah, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara inflasi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Akibatnya, inflasi memiliki pengaruh yang kecil dalam mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan tidak menurunkan atau meningkatkan ketimpangan.

Selain itu, sebagai akibat fluktuasi indeks Gini Indonesia yang mengukur ketimpangan pendapatan dan inflasi. Orang yang memiliki banyak uang dan pendapatan banyak tidak akan terpengaruh oleh daya belinya, meskipun tingkat inflasi tinggi dan menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal. Penduduk Indonesia kebanyakan bekerja dibidang pertanian, masyarakat berpenghasilan rendah tidak selalu dirugikan ketika harga barang kebutuhan pokok naik. Pendapatan mereka akan meningkat sebagai akibat dari kenaikan barang-barang kebutuhan pokok ini. Di Kabupaten Klungkung, Pramesti & Yasa (2019) didapat bahwa inflasi tidak berdampak pada ketimpangan. Di Indonesia, inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan antara tahun 2000 dan 2020, menurut Wijayanti dan Aisyah (2022).

Rasio Kemandirian Daerah

Uji validitas efek model ekonometrika (uji t) memperlihatkan hasil Rasio Kemandirian Daerah tidak berdampak pada ketimpangan pembangunan di perkotaan Provinsi Jawa Barat. Karena Rasio Kemandirian Daerah membutuhkan waktu untuk menurunkan ketimpangan pendapatan, tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Akses terhadap faktor-faktor nilai tambah produksi yang juga terbatas akan dipengaruhi oleh kurangnya akses masyarakat kelas bawah terhadap faktor-faktor tersebut. Bisa ditegaskan, meski Rasio Kemandirian Daerah meningkat, namun belum mampu menjangkau masyarakat eselon bawah.

Menurut Haikal (2020), ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara tidak dipengaruhi oleh Rasio Kemandirian Daerah. Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di Indonesia antara tahun 2000 dan 2020, menurut Wijayanti dan Aisyah (2022)..

Rasio Tenaga Kerja Industri

Studi ini menemukan bahwa ketimpangan pendapatan tidak dipengaruhi oleh Rasio Tenaga Kerja Industri. Hal ini disebabkan pekerja yang tidak berusaha keras akan semakin sulit mendapatkan insentif. Secara tidak langsung, ketimpangan menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang merupakan modal dasar untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Industri lain akan berkembang sebagai akibat dari perkembangan industri, yang juga akan meningkatkan kesempatan kerja. Masyarakat akan dapat meningkatkan taraf hidup dan pemerataan pendapatan di setiap kabupaten atau kota sebagai akibat dari bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan. Menurut Williamson, pembangunan cenderung terkonsentrasi di daerah

pusat tetapi pada akhirnya akan melambat, sehingga tercipta lapangan kerja baru di daerah yang kurang berkembang dan penurunan atau penghentian emigrasi ke daerah yang lebih kaya.

Rasio Tenaga Kerja Industri tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di Pulau Sulawesi menurut Nurmawati (2022). Rasio Tenaga Kerja Industri tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di Indonesia menurut Distovianti (2019). Fadilah dkk, 2017) menemukan hal yang sama: ketimpangan di Wilayah Provinsi Jawa Timur tidak dipengaruhi oleh Rasio Tenaga Kerja Industri.

Angkatan Kerja

Berdasarkan temuan analisis data, ketimpangan pendapatan di perkotaan Provinsi Jawa Barat akan dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh angkatan kerja dari tahun 2015 hingga 2021. Akibatnya, struktur perekonomian Wilayah Kota Provinsi Jawa Barat tetap bertumpu pada kekayaan sumber daya alam atau industri primer seperti penggalian dan pertambangan.

Masyarakat akan dapat meningkatkan taraf hidup dan pemerataan pendapatan di setiap kabupaten atau kota sebagai akibat dari bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan. Menurut Williamson, pembangunan cenderung terkonsentrasi di daerah pusat namun lambat laun akan melambat sehingga tercipta lapangan kerja baru di daerah yang kurang berkembang dan menurunkan ketimpangan.

Ketimpangan dipengaruhi oleh tenaga kerja, menurut Effendy dan Djohan (2022). Adriani (2020) juga menemukan hal yang sama: bahwa ketimpangan Indonesia dipengaruhi oleh angkatan kerja.

Simpulan

Sebagai estimasi yang paling akurat, model estimasi Fixed Effect Model (FEM) dipilih. Model estimasi FEM lolos uji good-of-fit dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,616234, yang menunjukkan bahwa variabel Inflasi, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Tenaga Kerja Industri, dan Angkatan Kerja dapat menyumbang 61,6 persen variasi dalam Variabel Ketimpangan Pendapatan. Sisanya sebesar 38,4 persen dipengaruhi oleh variabel atau faktor non model lainnya. Variabel bebas yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 adalah Tenaga Kerja, sesuai hasil uji validitas pengaruh (uji t). Ketimpangan Pendapatan tidak dipengaruhi oleh Rasio Tenaga Kerja Industri (RTKI), Rasio Kemandirian Daerah (RKD), maupun inflasi (INF). Dipercaya bahwa ujian-ujian yang akan datang sebenarnya perlu menggunakan faktor-faktor lain yang lebih membingungkan dan dapat diukur dalam memahami unsur-unsur ketidakseimbangan upah, mengingat faktor otonom yang digunakan dalam penelitian ini belum sepenuhnya mampu memahami variabel-variabel upah. perbedaan. di wilayah yang lebih luas. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan faktor jangka pendek dan jangka panjang yang

berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dengan menggunakan alat analisis yang canggih dan metodis...

Referensi

- Adriani, N. A. (2020). Pengaruh Dinamika Sektor Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Anshari, M., Azhar, Z & Ariusni. (2018). Analisis Pengaruh pendidikan, upah minimum provinsi dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. *Ecogen*. 1(3).
- Aprianoor, P & Muktiali, M. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknik PWK*, 4(4), 484-498.
- Asmara, A & Suci, S. C. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. 6(1).
- Aulia. N. (2014). Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. *Economics Development Analysis Journal*. 3(2).
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Gini*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Distovianti. R. C. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Skripsi. UNPAR.
- Effendy, C. A & Djohan, S. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan. *KINERJA*. 18(4), 680-688.
- Enceng., Irianto, L. B., & Purwaningdyah, M. W.(2012). Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 12(1).
- Fadilah, N., Nuraini, I., & Susilowati, S. (2017). Pengaruh Industri, Tenaga Kerja Industri dan Pdrb Sektor Industri Terhadap Disparitas Pendapatan Antar Wilayah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*. 1(4), 441-452.
- Haikal, M. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Holifah. (2017). Faktor-Faktor Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015. Skripsi.UIN Sunan Kalijaga.
- ILO. (2013). *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013*. Jakarta: International Labor Organization.
- Kemenkeu. (2018). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat.
- Khusaini. (2018). *Kuangan Daerah*. Jakarta: UB Press
- Laut, L. T., Putri, A. S., & Septiani, Y. (2020). Pengaruh Pma, Pmdn, Tpak, Pdrb Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Disparitas Pendapatan Jawa. *Stability: Journal of Management and Business*, 3(2), 21–34. <https://doi.org/10.26877/sta.v3i2.7781>.

- Mahadi, Z. P., Syariuddin, A., & Nuryadin, D. (2022). Determinan Disparitas Distribusi Pendapatan di Jawa Barat (2011-2020): Pendekatan Panel Spasial.. *Sibatik Journal*, 1(10).
- Mishkin, F. S. (2010). *The Economics of Money, Banking, and Fiancial Markets*. Boston: Pearson Addison Wesley.
- Nurmawati, S. (2022). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sulawesi*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Pramesti, D. A. D. G & Yasa, I. N. M. (2019). Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal EP Unud*. 8(11), 2562-2590.
- Putri, Y. K., Amar, S & Aimon, H. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. 3(6), 1-10.
- Rahman, R & Putri, D. Z. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera. *JKEP: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*. 3(3), 36-47.
- Rozali, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Implikasinya terhadap Kemiskinan di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi*. 22(01), 1-16.
- Santoso, F. D. P., & Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Pendidikan*, 1(2), 146–162. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p146-162>
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers
- Todaro, M. P & Smith, S. C. (2015). *Economic development 12th Edition*. United States of America: Pearson.
- Wahyuni, S & Andriyani, D. (2022). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 05(1).
- Widyastuti & Indrawati, R. A. (2021). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 95-104.
- Wijayanti, E. S & Aisyah, S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Asing, Inflasi, dan Trade Openness terhadap Ketimpangan di Indonesia Tahun 2000-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 534-540.